

**TINJAUAN PERSPEKTIF FILSAFAT: KEBIJAKAN EKONOMI BIRU
UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR*****REVIEW OF PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES: BLUE ECONOMIC
POLICIES FOR POVERTY ALLEVIATION IN COASTAL COMMUNITIES*****Syarif Husni¹ dan Muhammad Sarjan¹**¹Program Studi Doktor Pertanian Berkelanjutan, Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram,
IndonesiaEmail Korespondensi :: syarifhusni1964@gmail.com**ABSTRAK**

Terjadi paradoks dimana kekayaan sumberdaya pesisir yang melimpah namun belum mampu mensejahterakan masyarakat pesisir. Persoalan ini menjadi bahan diskusi yang menarik dalam konteks filsafat. Tujuan penelitian adalah : a) membedah dari perpektif filsafat tentang kemiskinan, b) Tinjauan ontologis: mengapa masyarakat pesisir miskin c) apakah kebijakan ekonomi biru dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan d) bagaimana potensi dan tantangan ekonomi biru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan studi literatur ilmiah yang dikaji dari berbagai sumber terutama dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional maupun jurnal nasional baik yang yang sudah terindex scopus maupun jurnal yang sudah terakreditasi SINTA. Berdasarkan kajian dan riset dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari prespektif filsafat yang berbeda, tapi pada intinya kemiskinan dipandang pada ketimpangan struktural dalam cara manusia memanfaatkan sumber daya alam.selain itu. kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan pada keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur serta layanan dasar. Kemudian ekonomi biru memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu potensi ekonomi biru, adalah penciptaan lapangan kerja baru dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi ekonomi biru adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur, teknologi dan perubahan iklim serta ketidakpastian ekosistem laut.

Kata kunci : Filsafat kemiskinan, ekonomi biru, masyarakat pesisir

ABSTRACT

There is a paradox where the wealth of coastal resources is abundant but has not been able to improve the welfare of coastal communities. This issue is an interesting topic of discussion in the context of philosophy. The research objectives are: a) dissect from a philosophical perspective about poverty, b) ontological review: why are coastal communities poor c) can blue economy policies alleviate poverty in coastal communities and d) what are the potential and challenges of the blue economy in alleviating poverty in coastal communities? This research uses scientific literature studied from various sources, especially from articles published in international journals and national journals, both those that have been indexed by Scopus and journals that have been accredited by SINTA. Based on the studies and research carried out, it can be concluded that poverty can be seen from different philosophical perspectives, but in essence poverty is seen as structural inequality in the way humans utilize natural resources. The poverty of coastal communities is caused by limited access to economic resources and limited access to infrastructure and basic services. Then the blue economy provides space for coastal communities to achieve prosperity. Apart from that, the potential of the blue economy is the creation of new jobs and more efficient and sustainable management of natural resources. The challenges faced by the blue economy are limited access to infrastructure, technology and climate change as well as uncertainty in marine ecosystems.

Keywords: Philosophy of poverty, blue economy, coastal communities

PENDAHULUAN

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, dan perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan

Konsep ekonomi biru muncul sejak awal tahun 2000an ketika pembangunan berkelanjutan mulai memperoleh perhatian global. Istilah ekonomi biru pertama kali dicetuskan oleh Gunter Pauli, seorang pengusaha dan pendukung keberlanjutan dari Belgia melalui bukunya yang berjudul "*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million Jobs*". Dalam bukunya, Pauli memperkenalkan konsep perekonomian jenis baru yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa lautan adalah sumber kekayaan yang belum dimanfaatkan dan dapat memecahkan banyak masalah lingkungan dan ekonomi dunia, seperti perubahan iklim, kelangkaan energi, dan kemiskinan (Suryandari, 2024).

Konsep ekonomi biru merupakan model pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pembangunan dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam serta lingkungan yang berlebihan. Model pembangunan yang diterapkan pada konsep ini yakni praktek ekonomi untuk jangka panjang dengan menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Nurhayati, 2015). Pembangunan ekonomi biru dilakukan melalui empat pilar yakni integrasi pembangunan daratan dan kelautan; pembangunan yang bersih, inklusif serta berkelanjutan; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui inovasi dan peningkatan masyarakat yang adil, merata dan pantas (Rani et al, 2015). Upaya pembangunan kekuatan berbasis ekonomi biru biasanya meletakkan masyarakat sebagai salah satu pusat pergerakan. Bahkan nilai-nilai kearifan local yang terlahir di masyarakat biasanya sudah menanamkan prinsip-prinsip ekonomi biru secara general (Firadus et al, 2021).

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US\$ 1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5,8 juta km² dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta km². Ada sekitar 60 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan brutto nasional. Tak bisa dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Indonesia adalah salah satu penghasil ikan terbesar di dunia. Berdasarkan data KKP (2023), produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2022 mencapai 7,32 juta ton. Potensi sumberdaya perikanan tangkap berbasis Maximum Sustainable Yield (MSY) di Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 12,54 juta ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan mencapai 80% dari MSY, yaitu 10,03 juta ton per tahun (Bashir, 2019). Meskipun jumlah yang ditangkap belum maksimal, Indonesia tetap menempati posisi kedua sebagai negara penangkap ikan terbesar dunia di bawah Tiongkok (Whisnant et al, 2015)

Masyarakat pesisir sebagian besar adalah nelayan yang dipandang identik dengan masyarakat marjinal dan miskin, namun mereka bahagia menjalani kehidupannya (Nikijuluw, 2001). Kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama mengapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu (Smith, 1979), serta menganggap hidup miskin sebagai nelayan sudah menjadi jalan hidupnya (Panayotou, 1980). Masyarakat pesisir memiliki akses langsung terhadap sumberdaya, secara sosial-ekologi masyarakat pesisir memiliki suatu keterkaitan dan ketergantungan dengan keberadaan ekosistem/ ekologi. Masyarakat pesisir sebagian besar adalah pembudidaya dan nelayan yang dipandang identik dengan masyarakat marjinal dan miskin.

Penelitian ini menyoroti kebijakan ekonomi biru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, Terdapat paradoks dimana kekayaan sumberdaya pesisir yang melimpah namun belum mampu mensejahterakan masyarakat pesisir. Persoalan ini menjadi bahan diskusi yang menarik dalam konteks filsafat.

Tujuan penelitian ini adalah a) membedah dari perpektif filsafat tentang kemiskinan, b) mengapa masyarakat pesisir miskin? dan c) apakah kebijakan ekonomi biru dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir serta d) bagaimana potensi dan tantangan ekonomi biru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur ilmiah yang dikaji dari berbagai sumber terutama dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional maupun jurnal nasional baik yang sudah terindex scopus maupun jurnal yang sudah terakreditasi SINTA, selain ini juga tulisan ini juga berasal dari proceeding dan buku yang berkaitan dengan topik atau materi artikel, data yang berasal dari berbagai sumber direview, ditelaah, dikritisi dan diolah menjadi suatu kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Filsafat melihat Kemiskinan

Filsafat tentang kemiskinan seringkali dikaitkan dengan berbagai pemikiran tentang keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan hak-hak dasar manusia. Berbagai aliran filsafat mencoba menjelaskan dan mengkritik keadaan kemiskinan dari perspektif yang berbeda. Dalam aliran Marxisme, kemiskinan dianggap sebagai akibat dari sistem kapitalisme yang eksploitatif. Karl Marx berpendapat bahwa kemiskinan adalah konsekuensi dari pemilikan pribadi atas alat produksi yang menyebabkan ketimpangan kekayaan antara kelas kapitalis (pemilik modal) dan kelas proletariat (pekerja). Dalam pandangannya, kemiskinan muncul karena nilai lebih yang dihasilkan oleh pekerja diambil oleh kapitalis dalam bentuk laba. Marxisme mengusulkan revolusi sosial untuk menggantikan kapitalisme dengan sistem sosialisme atau komunisme yang lebih adil. Marx menganggap kemiskinan sebagai fenomena struktural yang tak terhindarkan dalam kapitalisme, di mana masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas sosial yang satu mendominasi yang lain. Bagi Marx, untuk mengatasi kemiskinan, perlu ada penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pembentukan sistem ekonomi yang egaliter (Caligis, 2014).

Filsafat utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan pada pencapaian kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang

terbanyak. Dalam konteks kemiskinan, utilitarianisme menilai bahwa kemiskinan merugikan kebahagiaan sosial karena kemiskinan menyebabkan penderitaan dan keterbatasan dalam mencapai kesejahteraan. Utilitarianisme mendukung redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dianggap sebagai cara yang sah untuk mencapai kebahagiaan sosial yang lebih besar, karena mengurangi penderitaan individu yang miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Agusti, 2009)

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengusulkan prinsip-prinsip keadilan yang mendukung pembagian sumber daya yang lebih adil. Rawls menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat. Salah satu prinsip kunci dalam teori Rawls adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya dibenarkan jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling miskin atau terpinggirkan. Dalam pandangannya, kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan akan lebih adil, karena mereka yang paling lemah dalam masyarakat mendapat manfaat dari redistribusi sumber daya (Sapsudin A, 2024).

Dalam aliran eksistensialisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, kemiskinan dilihat dari perspektif penderitaan individu. Eksistensialis memandang bahwa kehidupan manusia sering kali diliputi oleh absurditas dan penderitaan, dan kemiskinan dapat menjadi salah satu bentuk penderitaan yang mengekang kebebasan individu. Bagi para eksistensialis, meskipun individu miskin berada dalam situasi yang sulit, mereka tetap memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup mereka. Sartre menekankan pentingnya kebebasan individu, meskipun dalam realitas kemiskinan, kebebasan itu sering kali terhambat oleh struktur sosial dan ekonomi (Machan, 2006). *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas*. Yayasan Obor Indonesia.

Beberapa filsuf kontemporer, terutama yang terlibat dalam pemikiran keberlanjutan dan etika lingkungan, melihat kemiskinan sebagai bagian dari ketimpangan struktural dalam cara manusia memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, mereka melihat hubungan antara kemiskinan dan eksploitasi lingkungan, di mana komunitas miskin sering kali menjadi korban dari kerusakan ekologis dan perubahan iklim, meskipun mereka tidak berkontribusi secara signifikan terhadap masalah tersebut. Para filsuf lingkungan, seperti Arne Naess dan Martha Nussbaum, berbicara tentang keadilan ekologis dan distribusi sumber daya secara adil untuk mengurangi kemiskinan. Mereka berargumen bahwa keberlanjutan bukan hanya soal melindungi alam, tetapi juga memastikan bahwa orang miskin memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang (Dewi et al., 2024).

Filsafat feminisme juga memiliki pandangan penting mengenai kemiskinan, terutama dalam hal ketidaksetaraan gender. Banyak perempuan yang hidup dalam kemiskinan karena mereka sering kali diperlakukan tidak adil dalam struktur ekonomi dan sosial. Feminisme mengkritik ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan, yang sering kali memperburuk kemiskinan bagi perempuan. Konsep interseksionalitas, yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw, mengajak kita untuk memahami bagaimana kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh kelas sosial, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti ras, jenis kelamin, orientasi seksual, dan lainnya. Aliran ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, kita perlu memperhatikan berbagai lapisan ketidaksetaraan yang saling berinteraksi (Zuhri et al., 2022).

Anarkisme berpendapat bahwa negara dan sistem kekuasaan yang ada berkontribusi pada kemiskinan, karena negara sering kali melindungi kepentingan kelas penguasa dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Anarkisme mengusulkan penghapusan negara dan struktur hierarkis lainnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter, di mana orang-orang dapat mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa eksploitasi dan kemiskinan. Dalam pandangan anarkis, kemiskinan dapat diatasi melalui pengorganisasian sosial yang berbasis pada solidaritas, di mana orang-orang saling membantu tanpa mengandalkan sistem kapitalis yang eksploitatif (Puspita et al., 2024)

Tinjauan Perspektif Ontologis, Mengapa Masyarakat Pesisir Miskin?

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada seluruh negara baik negara berkembang atau negara maju. Kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan standar kehidupan yang lain. Hingga saat ini Negara Indonesia masih tetap didera oleh begitu banyak permasalahan, diantaranya: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Masalah - masalah yang sering dilihat diantaranya: 1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4) kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan 6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2009).

Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. Secara alamiah laut memang sulit diprediksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, di bawah cengkeraman tengkulak, dan keterbatasan teknologi. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia selanjutnya dan, masyarakat kembali menjadi miskin.

Kemiskinan di masyarakat pesisir bisa dipahami melalui berbagai perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Masyarakat pesisir sering kali menghadapi tantangan yang spesifik, baik yang terkait dengan faktor alam maupun dengan struktur sosial dan ekonomi yang ada. Beberapa alasan mengapa masyarakat pesisir rentan terhadap kemiskinan antara lain:

Banyak masyarakat pesisir mengandalkan sumber daya alam seperti perikanan untuk mata pencaharian mereka. Namun, sumber daya ini sering kali terbatas dan rentan terhadap perubahan musim atau peristiwa alam yang tak terduga. Misalnya, hasil tangkapan ikan yang tidak stabil atau menurun karena overfishing, kerusakan ekosistem laut, atau perubahan iklim dapat membuat pendapatan masyarakat pesisir menjadi tidak tetap dan tidak memadai. Banyak masyarakat pesisir yang sangat tergantung pada satu jenis mata pencaharian, seperti perikanan, kelautan, atau pertanian berbasis lahan pesisir. Ketergantungan pada satu sektor ini membuat mereka

sangat rentan terhadap guncangan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang mengganggu sektor tersebut.

Pola hidup masyarakat pesisir sering kali bergantung pada ekosistem laut yang sehat, seperti terumbu karang, hutan mangrove, atau estuari. Namun, perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia seperti penambangan pasir atau reklamasi lahan dapat merusak ekosistem ini, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan mengganggu mata pencaharian mereka. Masyarakat pesisir sering kali lebih rentan terhadap bencana alam, seperti badai, tsunami, atau banjir. Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim juga mengancam kelangsungan hidup banyak komunitas pesisir yang tinggal di daerah rendah atau di pulau-pulau kecil. Pencemaran laut dan degradasi tanah juga memperburuk ketahanan pangan dan sumber daya alam bagi mereka.

Sebagian besar wilayah pesisir, terutama yang terpencil, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar sering kali terbatas. Keterbatasan ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan menghambat pengembangan sumber daya manusia yang penting untuk meningkatkan taraf hidup. Aksesibilitas yang buruk ke pasar, kota-kota besar, dan pusat-pusat ekonomi juga membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Keterisolasian ini memperburuk kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang pekerjaan, pendidikan, atau bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Masyarakat pesisir berada dalam struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor primer, seperti perikanan dan pertanian, yang sering kali tidak memiliki nilai tambah yang tinggi. Ketika harga pasar komoditas (seperti ikan atau hasil laut) turun, atau ketika sumber daya alam mereka semakin habis, masyarakat ini langsung terdampak dan jatuh ke dalam kemiskinan karena kurangnya diversifikasi ekonomi. Industri perikanan dan kelautan sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global. Jika harga ikan turun di pasar internasional atau terjadi persaingan dari negara lain, pendapatan masyarakat pesisir bisa langsung terpengaruh.

Di beberapa negara, hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah pesisir sering kali tidak diakui atau terabaikan, baik oleh negara atau oleh perusahaan besar. Masyarakat pesisir, yang biasanya memiliki cara hidup yang tradisional, mungkin tidak memiliki hak hukum atas tanah atau perairan yang mereka gunakan untuk mencari nafkah. Hal ini dapat mengarah pada perampasan sumber daya alam mereka untuk kepentingan pembangunan, pariwisata, atau ekstraksi sumber daya alam, meninggalkan mereka dalam kondisi kemiskinan. Dalam beberapa kasus, masyarakat pesisir dieksploitasi oleh perusahaan besar atau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada mereka. Misalnya, reklamasi pantai untuk pembangunan infrastruktur atau pariwisata bisa mengusir masyarakat pesisir dari tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka tanpa ganti rugi yang memadai.

Masyarakat pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena akses yang terbatas ke sekolah atau pelatihan keterampilan. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi yang terjadi. Masyarakat pesisir yang lebih terisolasi atau yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan dan pelatihan sering kali hanya memiliki pilihan kerja yang terbatas, yang cenderung tidak stabil dan bergaji rendah. Pekerjaan musiman atau pekerjaan dengan upah rendah, seperti buruh kasar atau nelayan, adalah pekerjaan yang sering ditemui.

Komunitas pesisir sering kali tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik atau ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini membuat mereka terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan yang dapat

meningkatkan taraf hidup mereka. Beberapa kelompok masyarakat pesisir, seperti nelayan kecil, sering kali tidak memiliki representasi atau kekuatan politik untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka mungkin juga menghadapi diskriminasi sosial atau ketidakadilan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya.

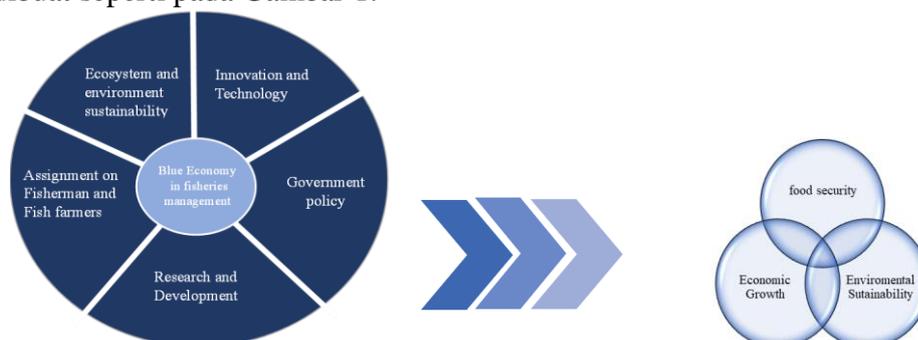
Dengan meningkatnya globalisasi, sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk keuntungan global, sering kali tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal. Perubahan dalam struktur ekonomi global, seperti penurunan harga komoditas atau perubahan dalam permintaan pasar internasional, dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam. Proyek pembangunan besar seperti pariwisata, industri, atau infrastruktur sering kali mengorbankan sumber daya alam pesisir untuk kepentingan ekonomi global atau nasional, dengan sedikit manfaat bagi masyarakat setempat. Proyek-proyek ini sering kali merusak ekosistem lokal yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir.

Apakah Ekonomi Biru Mampu Berperan dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir?

Sejak abad ke-21, konsep “Ekonomi Biru” semakin populer. Masyarakat internasional percaya bahwa ekonomi biru mencakup tiga bentuk ekonomi: ekonomi yang mengatasi krisis air global (McGlade et al., 2012); pembangunan ekonomi inovatif (Pauli, 2009) dan pembangunan ekonomi kelautan (Behnam, 2012)

Australia meluncurkan Blue Well-being Initiative, mengakui bahwa pembangunan dan pertumbuhan industri berbasis laut, atau PDB biru mempunyai potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial Australia. UE mengemukakan konsep “pertumbuhan biru” pada tahun 2012, oleh karena itu, banyak negara menggunakan “Ekonomi Biru” sebagai alat atau sarana kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berfokus pada revitalisasi perekonomian, kegiatan industri kelautan meliputi konstruksi, transportasi, pengembangan sumber daya mineral, pembangunan kapal, pemasangan kabel komunikasi, perusahaan farmasi, penyebaran peralatan, energi berkelanjutan dari gelombang, arus, wisata rekreasi tepi laut, serta perikanan dan budidaya perairan. Selain kegiatan pembangunan kelautan tradisional, sektor informasi dan ilmu pengetahuan yang berorientasi kelautan juga memainkan peran yang semakin kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi biru.

Integrasi ekonomi biru dalam pengelolaan perikanan nasional mensyaratkan adanya harmonisasi berbagai sektor, dalam mendukung tujuan utama pengelolaan perikanan nasional. Berdasarkan tinjauan kebijakan pengelolaan perikanan nasional di atas, model integrasi ekonomi biru dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dibuat seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Model integrasi ekonomi biru dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Model integrasi ini melibatkan beberapa aspek, yaitu:

Inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi berperan sebagai enabler yang memungkinkan teknik pengelolaan perikanan menjadi lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi biru yang mengharuskan penggunaan metode yang efisien dan inovatif, dengan tetap menjaga ekosistem dan lingkungan. Dengan inovasi baru yang memanfaatkan teknologi untuk sumber daya perikanan, diharapkan dapat dikembangkan teknik pengelolaan ikan baru sehingga alam dapat memperkaya dirinya sendiri, merekayasa ekosistem yang lebih baik untuk alam atau menghasilkan varietas sumber daya ikan yang lebih unggul dan dapat menghasilkan lebih banyak.

Keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Ekonomi biru mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Penangkapan ikan dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan harus dihindari dan diganti dengan pengelolaan perikanan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan, karena sumber daya tersebut terbatas dan masih perlu dilestarikan untuk masa mendatang. Pemilihan metode penangkapan ikan yang menghindari kerusakan ekosistem, menghindari penangkapan berlebih, menghindarimenangkap ikan kecil dan ikan yang dilindungi, serta meminimalisir pemborosan merupakan suatu keharusan bagi usaha perikanan. Pertumbuhan ekonomi perikanan yang tinggi akan sia-sia jika ekosistemnya rusak dan tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi dapat bertahan di masa mendatang.

Keberpihakan pada nelayan dan pembudidaya ikan. Peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan secara makro harus diikuti dengan peningkatan ekonomi mikro pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Pembangunan ekonomi dalam ekonomi biru juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya ikan. Mereka juga harus dibekali dengan kemampuan tidak hanya menangkap, membudidayakan, dan menjual hasilnya, tetapi juga diajarkan tentang upaya peningkatan kualitas dan kapasitas usahanya, terutama dengan menggunakan teknik-teknik baru yang inovatif sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan usaha perikanannya dan memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Kebijakan pemerintah. Disimpulkan dari dasar-dasar pengelolaan perikanan terdapat tiga dasar utama perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, yaitu: Pertama, pengendalian input, yaitu input dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Hal ini meliputi kebijakan pengaturan wilayah pengelolaan perikanan, dan jumlah kapal penangkap ikan yang diperbolehkan melakukan penangkapan ikan. Kedua, pengendalian output, yaitu output dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Hal ini meliputi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat analisis pemanfaatan ikan dalam suatu wilayah pengelolaan perikanan. Ketiga, tindakan teknis, yaitu tindakan yang diperbolehkan dalam kegiatan penangkapan ikan. Hal ini meliputi jenis dan cara penangkapan ikan yang diperbolehkan, dan juga waktu penangkapan yang diperbolehkan. Ekonomi biru mensyaratkan komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait ketiga aspek di atas, dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar kegiatan pengelolaan perikanan tetap pada arah berkelanjutan.

Penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan upaya untuk menemukan cara-cara baru dalam mengelola perikanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Pada tahun 2018, anggaran penelitian

nasional hanya sekitar 0,3% dari PDB nasional. Selain itu, upaya penelitian dan pengembangan akan lebih baik jika dilakukan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan terbuka, yaitu hasil-hasil penelitian dipublikasikan dan masyarakat memiliki akses yang luas terhadap hasil-hasil penelitian tersebut tanpa komersialisasi yang akan dengan cepat mendorong para pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan inovasi-inovasi dan meningkatkan produksi perikananannya.

Integrasi dan penyelarasan seluruh aspek di atas diharapkan mampu membawa pengelolaan perikanan nasional berbasis ekonomi biru untuk mencapai tujuan utama pembangunan perikanan nasional, yaitu tercapainya ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Ekonomi Biru untuk Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Ekonomi biru bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan di sektor kelautan, seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata ekologi, energi terbarukan berbasis laut, dan pengelolaan ekosistem pesisir. Misalnya: pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan konservasi yang dilakukan dengan bijaksana, sumber daya perikanan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat pesisir memiliki akses yang lebih stabil terhadap ikan sebagai sumber pangan dan pendapatan. Kawasan pesisir yang terjaga kelestariannya dapat menarik pariwisata berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan ekonomi lokal tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Potensi besar energi laut, seperti energi pasang surut, gelombang laut, dan angin lepas pantai, dapat membuka peluang kerja baru di sektor energi terbarukan yang ramah lingkungan dan lebih inklusif.

Ekonomi biru yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam laut dengan cara yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Dengan praktik perikanan yang tidak merusak stok ikan dan ekosistem laut, serta mengurangi overfishing, kebijakan ekonomi biru bisa memastikan pasokan ikan yang lebih stabil, yang sangat penting sebagai sumber pangan dan mata pencaharian bagi banyak keluarga pesisir. Di samping itu, pengelolaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan padang lamun, yang berperan dalam memitigasi bencana alam, dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap ancaman perubahan iklim, seperti banjir atau badai. Ini bisa mengurangi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat pesisir akibat bencana alam, yang seringkali memperburuk kemiskinan mereka.

Kebijakan ekonomi biru berfokus pada penggunaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Pengelolaan yang efisien dan bijaksana akan menjaga kelestarian ekosistem laut yang penting bagi kehidupan masyarakat pesisir. Misalnya, pemulihan terumbu karang dan mangrove dapat mendukung keberagaman hayati serta menyediakan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi tanpa merusak kelestariannya.

Salah satu tujuan dari ekonomi biru adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan baru. Pendidikan yang lebih baik mengenai teknik-teknik perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis ekologi, dan pengelolaan ekosistem pesisir yang cerdas dapat membuka peluang untuk mengembangkan usaha atau karier baru di luar sektor perikanan tradisional yang mungkin sudah jenuh atau rentan terhadap kerusakan.

Tantangan Ekonomi Biru dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar, teknologi, dan

pasar. Oleh karena itu, untuk memastikan ekonomi biru dapat mengentaskan kemiskinan, penting untuk membangun infrastruktur yang memadai—seperti pelabuhan yang efisien, akses internet untuk pembelajaran, dan infrastruktur energi yang ramah lingkungan—serta menyediakan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor baru, seperti energi terbarukan atau pengelolaan ekosistem pesisir.

Kebijakan ekonomi biru yang berhasil dalam mengurangi kemiskinan haruslah inklusif, artinya melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi. Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam kebijakan ekonomi biru dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat, yang justru dapat memperburuk kemiskinan bagi mereka yang seharusnya diuntungkan.

Selain itu, kebijakan harus memitigasi dampak sosial-ekonomi dari transisi ke model ekonomi biru, misalnya dengan memberikan dukungan kepada nelayan tradisional yang mungkin kehilangan akses terhadap sumber daya atau mata pencaharian mereka akibat kebijakan konservasi atau peraturan perikanan yang lebih ketat.

Penerapan ekonomi biru sering kali memerlukan investasi besar, baik dalam hal penelitian, pembangunan kapasitas, maupun infrastruktur. Banyak negara berkembang yang memiliki masyarakat pesisir miskin mungkin tidak memiliki sumber daya atau dana yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan pendanaan baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga internasional untuk mendukung transisi ke ekonomi biru.

Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut, pemanasan suhu laut, dan peningkatan frekuensi bencana alam mengancam ketahanan ekosistem laut dan pesisir yang menjadi dasar kehidupan banyak masyarakat pesisir. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi biru harus diintegrasikan dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memastikan bahwa sektor-sektor kelautan tetap dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian dan riset dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari prespektif filsafat yang berbeda, tapi pada intinya kemiskinan dipandang pada ketimpangan struktural dalam cara manusia memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan pada keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur serta layanan dasar. Kemudian ekonomi biru memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu potensi ekonomi biru, adalah penciptaan lapangan kerja baru dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu tantangan yang dihadapi ekonomi biru adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur, teknologi dan perubahan iklim serta ketidakpastian ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti. (2009). *Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen*”.
- Bashir, M. A. (2019). Effect Of Halal Awareness, Halal Logo And Attitude On Foreign Consumers’ Purchase Intention. *British Food Journal*, 121(1).

- Behnam, A. (2012). Building a blue economy: strategy, opportunities and partnerships in the Seas of East Asia. *In The East Asian Seas Congress 2012*.
- Caligis, R. (2014). Nasionalisme dan kelas sosial: Ideologi dan praktik partai nasionalis di Indonesia. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(2), 77–90.
- Dewi, T. R., Ramadhani, N. A., Shakira, B. O., Jamal, D. K. N., Aisyah, M., Hidayat, I. F., & Angela, D. (2024). Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Melindungi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, 9(2), 1–19.
- Firadus, R. ., & Yuswadi, H. (2021). Petani dan Politik : Perspektif Pemimpin Ideal Bagi Masyarakat Petani di Desa Randuagung, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 10(1), 34–55.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Neayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Ar-Ruzz Media.
- Machan, T. R. (2006). *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas*. Yayasan Obor Indonesia.
- McGlade, J., Werner, B., Young, M., Matlock, M., Jefferies, D., & Sonnemann, G. (2012). *Measuring Water Use in a Green Economy, A Report of the Working Group on Water Efficiency to the International Resource Panel*. Nairobi. UNEP.
- Nikijuluw, V. P. H. (2001). Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *Prosiding Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*.
- Nurhayati, S. (2015). "Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 37–42.
- Panayotou, T. (1980). Economic Conditions and Prospects of Small Scale Fishermen in Thailand. *Marine Policy*, 142–146.
- Pauli, G. (2009). *The Blue Economy :A Report to the Club of Rome*. Nairobi: UNEP.
- Puspita, K. H., & Fuad, I. (2024). Pandangan Feminisme Poskolonial terhadap Upaya Amerika Serikat dalam Mempromosikan Hak Perempuan di Afganistan Paska 9/11. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(2).
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914–1928.
- Sapsudin A. (2024). *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati.
- Smith, G. . (1979). *Cryptogamic Botany: Bryophyta and Pteridophytes Vol. II Second Edition*. New Delhi: Tata Mc Grawhill Publishing Company Ltd.
- Suryandari. (2024). Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy Terhadap Pemberdayaan masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46-64.
- Whisnant, R., & Reyes, A. (2015). Blue Economy for Business in East Asia: Towards an Integrated Understanding of Blue Economy. *Partnership in Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA)*, 38(2).
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).